



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 116 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja pemerintah daerah di bidang keuangan, sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap Tahun Anggaran secara terpadu;
  - b. bahwa untuk kelancaran konsultasi dan perencanaan dalam proses penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021 serta agar proses evaluasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah.

- KETIGA** : Susunan Tim Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat:
    1. memberi petunjuk dan arahan dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
    2. menghimpun data penunjang dalam rangka evaluasi dan penelitian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021; dan
    3. menelaah dan mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
  - b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah:
    1. menyusun konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
    2. menyiapkan materi Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021;

3. menyiapkan materi tanggapan Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi maupun Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD yang disampaikan dalam pembahasan rancangan Perubahan APBD dan APBD Tahun Anggaran 2021; dan
4. menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penyusun dan Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

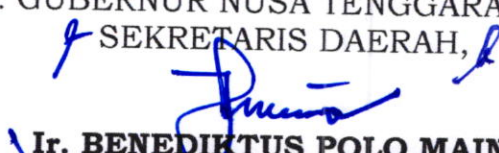
**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020.

**KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 19 MARET 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 116 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 MARET 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021  
TINGKAT PUSAT

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan APBD.
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan APBD.
3	Direktur Perencanaan Anggaran Daerah pada Ditjen Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Koordinator	Mengoordinir dan memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan APBD.
4	Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Wakil Ketua	a. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.

5	Kepala Seksi Wilayah IVA Subdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris I	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan b. mengkoordinir, menghimpun, menyuun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelitian dan penelaahan APBD.
6	Kepala Seksi Wilayah IVB Subdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Sekretaris II	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan b. mengkoordinir, menghimpun, menyuun, memberi petunjuk pelaksanaan pekerjaan dalam rangka penelitian dan penelaahan APBD.
7	Staf pada Sub direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah IV pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kementerian Dalam Negeri	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
8	Pejabat pada Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

  
 Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA  
 NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 116 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 19 MARET 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020  
DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2021  
TINGKAT DAERAH

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan APBD.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan penelaahan APBD.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas : a. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk dalam menelaah APBD; b. mengoordinir, menghimpun, memberi petunjuk teknis dalam menyiapkan dan mengevaluasi seluruh materi teknis penelitian dan penelaahan APBD agar sinkron dengan kebijakan dan prioritas perencanaan pembangunan daerah; dan c. mengoordinir, menghimpun, memberikan petunjuk dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris I	a. menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan APBD; dan b. mengoordinir, menghimpun, menyusun, memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penelitian dan penelaahan APBD.
7.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris II	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan dokumen perencanaan dan prioritas pembangunan daerah;
8.	Kepala Bidang Anggaran Pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Sekretaris III	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas menyiapkan langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan rencana kerja pelaksanaan penelitian dan penelaahan Rancangan APBD agar sinkron dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah.

9.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
11.	Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
12.	Inpektur Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD.
13.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data informasi tentang kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja organisasi dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD.
14.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
15.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
16.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pendapatan daerah, rencana kebutuhan barang unit dan ketersediaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

17.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pendapatan daerah, rencana kebutuhan barang unit dan ketersediaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
18.	Sekertaris pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
19	Sekertaris pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
20.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.</li> </ul>
21.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
22.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi pelaksanaan APBD dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

23.	Kepala Bidang Pembinaan Keuangan Kab/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi tentang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.
24.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25.	Kepala Bagian Persidangan, Humas dan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
26.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
27.	Kepala Sub Bagian Persidangan dan Alat Kelengkapan Dewan pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
28.	Kepala Sub Bagian Humas dan Publikasi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.
29.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD bersama DPRD.

31.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.</li> </ul>
32.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</li> </ul>

33.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Administrasi Umum pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum.</li> </ul>
34.	Patricia Maria Arthania, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan.</li> </ul>
35.	Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</li> </ul>
36.	Anselmusi Bhui/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</li> </ul>
37.	Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> </ul>

			c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.
38.	Muhamad Syahril, A.Md/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</p> <p>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</p> <p>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</p>
39.	Roy Laykohan, S.Kom/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<p>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</p> <p>b. Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</p> <p>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</p>

40.	Rudi Wahono Putro , S.Kom / Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan pembangunan.</li> </ul>
41.	Yakobis Dano, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

42.	Samuel Ndun, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
43.	Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

44.	Marsel Nani/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
45.	Sisilia Nineng Da Gomez/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

46.	Maria Selvyana Lalu Beo, SE/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan tugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan bidang Administrasi Umum;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan bidang Administrasi Umum; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan APBD Perubahan bidang Administrasi Umum.</li> </ul>
47.	Arifin, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

48.	Angelia Heleni Hayong, S.Sos/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
49.	Juanita Bengngu, A.Md/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

50.	Urias Nomleni/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
51.	Salwa Pua Dawe, SE/ Staf pada pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>

52.	Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan;</li> <li>b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan</li> <li>c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan Pembangunan.</li> </ul>
-----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,

**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014